

SANKSI EKONOMI DAN DAMPAK DOMINO:

Ketahanan Ekonomi Negara Berkembang
di Era Konflik



Oleh Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Sanksi Ekonomi dan Dampak Domino --
Ketahanan Ekonomi Negara Berkembang di Era Konflik*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)
Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991
Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)
Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)
AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

SANKSI EKONOMI DAN DAMPAK DOMINO -- KETAHANAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG DI ERA KONFLIK

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi dunia memasuki fase yang semakin ditandai oleh **konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, perluasan sanksi finansial, dan ketidakpastian kebijakan**. IMF mencatat bahwa pembatasan perdagangan baru meningkat tajam—lebih dari tiga kali lipat sejak 2019—sementara sanksi finansial juga meluas, bersamaan dengan lonjakan indeks risiko geopolitik pasca invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi ini menandai pergeseran dari globalisasi yang relatif efisien menuju tatanan global yang lebih terfragmentasi dan berbiaya tinggi. ([IMF](#))

Bagi negara maju, guncangan ini sering kali dapat diserap melalui pasar keuangan yang dalam, mata uang kuat, ruang fiskal lebih longgar, dan kapasitas institusi yang lebih matang. Namun bagi **negara berkembang**, khususnya yang bergantung pada impor energi/pangan, pembiayaan eksternal, remitansi, atau satu-dua komoditas ekspor utama, sanksi ekonomi di era konflik dapat bekerja seperti batu yang dijatuhkan ke permukaan air: gelombangnya menyebar ke mana-mana. Ia tidak berhenti pada negara target sanksi, tetapi menjalar melalui **harga energi, harga pangan, biaya logistik, sistem pembayaran lintas batas, kurs, inflasi, bunga, utang, hingga stabilitas sosial-politik**.

World Bank menggambarkan konteks global ini sebagai era dengan **ketidakpastian perdagangan dan kebijakan yang historis**, di mana pertumbuhan ekonomi negara berkembang tetap rentan dan ketimpangan pendapatan relatif terhadap negara maju sulit menyempit. Dalam proyeksi terbaru, pertumbuhan negara berkembang memang masih positif, tetapi pendapatan per kapita mereka tetap jauh tertinggal; bahkan World Bank menekankan bahwa pada laju saat ini pendapatan per kapita negara berkembang hanya sekitar 12% dari tingkat negara maju. ([World Bank](#))

Karena itu, ketika kita membahas "sanksi ekonomi", pertanyaan kuncinya bukan hanya: **apakah sanksi efektif menekan perilaku negara target?** Tetapi juga: **siapa saja yang menanggung biaya rambatan (spillover costs), bagaimana dampak domino terbentuk, dan strategi ketahanan apa yang realistis bagi negara berkembang?** Esai ini menjawab pertanyaan tersebut secara naratif-akademik, dengan menekankan mekanisme ekonomi-politik dan pilihan kebijakan yang relevan untuk era konflik kontemporer.

1) Apa itu sanksi ekonomi, dan mengapa dampaknya meluas?

Secara umum, sanksi ekonomi adalah instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan yang menggunakan pembatasan ekonomi/keuangan untuk memengaruhi perilaku suatu negara, entitas, atau individu. OFAC (U.S. Treasury) menjelaskan bahwa sanksi dapat berbentuk **komprehensif** atau **selektif**, menggunakan pemblokiran aset dan pembatasan perdagangan untuk tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. ([OFAC](#))

Definisi praktis ini penting, karena dalam praktik modern sanksi jarang hanya "larangan dagang total". Banyak sanksi saat ini bersifat **berlapis**:

pembekuan aset,

pembatasan akses ke sistem keuangan,

larangan ekspor/impur barang tertentu,

pembatasan teknologi,

daftar individu/entitas (targeted sanctions),

pembatasan jasa (perbankan, asuransi, perkapalan, dll.),

pembatasan sekunder (secondary sanctions risk) yang membuat pihak ketiga ikut menghindari.

Dalam konteks tersebut, **dampak meluas bukan semata karena teks regulasinya**, tetapi karena perilaku pelaku pasar. Bank, perusahaan logistik, perusahaan asuransi, trader komoditas, dan eksportir sering memilih berhati-hati secara berlebihan (over-compliance) untuk menghindari risiko pelanggaran. OHCHR mencatat bahwa over-compliance dapat berupa pemblokiran transaksi yang sebenarnya diizinkan, penundaan panjang, biaya tambahan, atau penolakan layanan terhadap pihak yang secara hukum tidak menjadi target sanksi, dan dampaknya dapat menghambat akses terhadap barang esensial termasuk pangan dan obat. ([OHCHR](#))

Di sinilah "dampak domino" mulai bekerja. Sanksi yang secara formal ditujukan kepada aktor tertentu dapat berubah menjadi:

shock harga (energi/pangan/pupuk),

shock pembiayaan (biaya kredit naik),

shock pembayaran (transaksi lintas negara tersendat),

shock ekspektasi (investor menahan modal),

shock sosial (daya beli turun, protes meningkat).

2) Kerangka analitis “dampak domino” bagi negara berkembang

Untuk memahami dampak sanksi di era konflik, lebih berguna jika kita memakai kerangka **berlapis** daripada melihat satu variabel saja (misalnya inflasi). Saya mengusulkan lima lapisan analisis berikut:

a. Putaran pertama: direct exposure

Ini adalah dampak langsung pada negara target atau mitra dagang utamanya:

ekspor turun,

impor terganggu,

transaksi bank dibatasi,

kontrak batal,

biaya asuransi pengiriman naik.

b. Putaran kedua: price and logistics transmission

Gangguan pasokan dan rerouting perdagangan memengaruhi:

harga minyak/gas,

gandum dan pangan pokok,

pupuk dan input pertanian,

biaya freight/logistik,

lead time pengiriman.

World Bank menekankan bahwa dekade ini ditandai volatilitas harga komoditas yang sangat tinggi, didorong oleh kombinasi konflik, ketegangan geopolitik, hambatan perdagangan, dan guncangan cuaca. Bahkan ketika harga komoditas global menurun, volatilitas yang tinggi

tetap menjadi ancaman bagi dua pertiga negara berkembang. ([World Bank](#))

c. Putaran ketiga: financial and currency amplification

Negara berkembang lalu menghadapi:

inflasi impor,

depresiasi kurs,

kenaikan suku bunga domestik,

beban utang valas meningkat,

pengetatan kredit.

World Bank melaporkan bahwa negara berkembang membayar **rekor** layanan utang luar negeri dan bunga yang melonjak, menekan belanja untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan. Tekanan ini paling berat pada negara-negara termiskin/IDA. ([World Bank](#))

d. Putaran keempat: fiscal-social stress

Pemerintah dipaksa memilih:

subsidi energi/pangan vs disiplin fiskal,

stabilisasi kurs vs pertumbuhan,

belanja sosial vs pembayaran utang,

investasi jangka panjang vs krisis jangka pendek.

Ketika kapasitas fiskal terbatas, shock sementara dapat berubah menjadi krisis pembangunan jangka panjang.

e. Putaran kelima: institutional and political consequences

Jika tekanan ekonomi berkepanjangan:

kepercayaan publik pada pemerintah menurun,

polarisasi meningkat,

reformasi struktural tertunda,

ruang politik untuk kebijakan rasional menyempit,

investor makin wait and see.

Dalam konteks ini, "ketahanan ekonomi" bukan hanya soal cadangan devisa, tetapi juga **kapasitas institusional untuk memutus rantai domino sebelum menjadi krisis sistemik.**

3) Kanal utama dampak domino sanksi ekonomi

3.1 Kanal perdagangan dan rantai pasok

Sanksi di era konflik hampir selalu berinteraksi dengan jaringan perdagangan yang sudah sangat saling terkait. Produk energi, pupuk, logam, gandum, komponen industri, dan jasa keuangan bukan bergerak dalam jalur tunggal, melainkan dalam jaringan multi-negara. Maka ketika satu node penting terganggu, negara berkembang yang tidak ikut berkonflik pun tetap terkena dampak.

Narasinya sering seperti ini: sebuah negara berkembang mengimpor bahan bakar dan pupuk dari pasar global. Konflik memicu sanksi terhadap produsen/eksportir besar. Pasokan global tidak hilang seluruhnya, tetapi:

terjadi rerouting,

pembeli berebut sumber alternatif,

biaya pengiriman meningkat,

waktu pengadaan memanjang,

kontrak menjadi lebih mahal.

Hasil akhirnya: **import bill naik**, defisit transaksi berjalan melebar, kurs tertekan, lalu inflasi. Di tingkat mikro, petani membeli pupuk lebih mahal, pabrik menghadapi listrik/energi lebih mahal, dan rumah tangga membayar pangan lebih mahal.

IMF juga mengaitkan konteks ini dengan *gloeconomic fragmentation*: pembatasan perdagangan meningkat tajam dan kekhawatiran sektor swasta terhadap fragmentasi melonjak. Artinya, bahkan ketika sanksi tidak langsung mengenai sebuah negara berkembang, perusahaan global bisa mengubah strategi pasok dan investasi mereka secara defensif. ([IMF](#))

3.2 Kanal harga energi, pangan, dan pupuk

Ini adalah kanal yang paling cepat terasa oleh masyarakat. Konflik dan sanksi yang menysar/berdampak pada negara produsen komoditas strategis dapat menciptakan:

lonjakan harga energi,

kenaikan biaya transportasi dan produksi,

inflasi pangan melalui biaya input dan distribusi,

tekanan fiskal akibat subsidi.

World Bank menegaskan bahwa guncangan dekade ini telah membuat volatilitas komoditas lebih tinggi dibanding dekade-dekade sebelumnya (setidaknya sejak 1970-an), dan kombinasi konflik, ketegangan geopolitik, hambatan perdagangan, serta cuaca ekstrem membuat era turbulensi komoditas lebih mungkin berlanjut. ([World Bank](#))

Menariknya, bahkan ketika World Bank memproyeksikan penurunan harga komoditas global pada 2025–2026, lembaga ini tetap mengingatkan bahwa:

volatilitas masih tinggi,

harga nominal masih bisa berada di atas pra-pandemi,

konflik tetap menjadi pendorong utama kerawanan pangan akut di wilayah tertentu.

World Bank bahkan menyebut estimasi PBB bahwa kerawanan pangan akut dapat mengintensif pada jutaan orang di ekonomi rentan, dan penurunan harga komoditas tidak otomatis mengatasi akar masalah hunger yang berbasis konflik. ([World Bank](#))

FAO juga menunjukkan bahwa indeks harga pangan dunia (FFPI) memang telah turun jauh dari puncak Maret 2022, namun dinamika komponen (sereal, minyak nabati, gula, daging, dairy) tetap berubah-ubah dari bulan ke bulan. Artinya, dari sudut pandang kebijakan negara berkembang, “harga rata-rata turun” tidak sama dengan “risiko pangan selesai”. Volatilitas tetap menuntut kewaspadaan stok, logistik, dan perlindungan sosial. ([FAOHome](#))

Kasus naratif (hipotetis tetapi realistis):

Sebuah negara berkembang pengimpor BBM dan gandum mengalami lonjakan harga impor akibat konflik dan sanksi. Pemerintah menahan kenaikan harga domestik dengan subsidi. Fiskal melemah. Ketika pasar melihat defisit fiskal membesar dan cadangan devisa menurun, premi risiko naik. Mata uang terdepresiasi. Akibatnya, biaya impor naik lagi. Di titik ini, masalah bukan lagi hanya “harga minyak”, tetapi **spiral energi–fiskal–kurs**.

3.3 Kanal keuangan dan sistem pembayaran lintas batas

Dalam era ekonomi digital dan finansialisasi, sanksi sering bekerja lebih efektif melalui sistem keuangan daripada perdagangan fisik semata. Karena itu, dampak domino juga sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di:

bank koresponden,

jaringan pesan keuangan,

kepatuhan AML/CFT/sanctions screening,

asuransi dan trade finance.

SWIFT menegaskan posisinya sebagai jaringan global dengan lebih dari 11.000 institusi keuangan, dan memiliki halaman khusus terkait kepatuhan dan sanksi, termasuk pernyataan mengenai sanksi Rusia pada Maret 2022. Ini menunjukkan bahwa ketika sanksi meningkat, efeknya tidak hanya legal, tetapi juga operasional pada infrastruktur keuangan global. ([Swift](#))

BIS Innovation Hub (Project Mandala) juga menggarisbawahi bahwa pembayaran lintas batas menghadapi tantangan regulasi bersama, termasuk **sanctions screening**, di samping kewajiban yang spesifik menurut koridor transaksi, tujuan transfer, dan lokasi penerima akhir. Dalam bahasa sederhana: transaksi lintas batas menjadi semakin mahal, lambat, dan kompleks ketika risiko sanksi meningkat. ([Bank for International Settlements](#))

Bagi negara berkembang, implikasinya besar:

UKM eksportir sulit menerima pembayaran,

importir harus menyiapkan dokumentasi lebih rumit,

biaya transfer meningkat,

bank lokal makin konservatif,

waktu pencairan trade finance memanjang.

Jika ini terjadi pada ekonomi yang sangat bergantung pada impor bahan baku atau remitansi, dampak sosialnya cepat terasa.

3.4 Kanal remitansi dan “de-risking”

Remitansi adalah urat nadi ekonomi rumah tangga di banyak negara berkembang. World Bank menekankan pentingnya remitansi dan perlunya mengurangi biaya pengiriman, termasuk dengan mengatasi hambatan seperti **de-risking oleh correspondent banks**. ([World Bank](#))

De-risking terjadi ketika lembaga keuangan memutuskan atau membatasi hubungan dengan klien/negara/koridor tertentu karena biaya kepatuhan dianggap terlalu tinggi dibanding manfaat bisnis. Dalam konteks sanksi, de-risking bisa meningkat karena bank takut salah langkah. Masalahnya, yang terdampak bukan hanya entitas berisiko tinggi, tetapi juga:

pekerja migran yang mengirim uang ke keluarga,

pelaku UMKM lintas batas,

organisasi kemanusiaan,

importir kebutuhan pokok.

OHCHR secara eksplisit menjelaskan bahwa over-compliance dapat menghambat transaksi yang sebenarnya legal, termasuk transfer dana keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Dari sudut ketahanan ekonomi negara berkembang, ini penting sekali: ketika remitansi terganggu, konsumsi rumah tangga, pendidikan anak, dan ketahanan pangan lokal bisa langsung tertekan. ([OHCHR](#))

Narasi kebijakan:

Bayangkan negara berkembang kecil yang 10–20% rumah tangganya bergantung pada remitansi. Tidak ada sanksi langsung kepada negara

itu. Tetapi karena bank internasional memperketat screening di koridor tertentu, biaya transfer naik dan transaksi sering tertunda. Pada level makro, konsumsi menurun. Pada level mikro, keluarga menunda belanja gizi, kesehatan, dan sekolah. Di sini terlihat jelas bahwa “dampak domino” bekerja melalui **saluran yang tampak administratif, tetapi berujung pada outcome pembangunan.**

3.5 Kanal utang, suku bunga, dan ruang fiskal

Sanksi ekonomi di era konflik jarang berdiri sendiri; ia sering hadir bersamaan dengan pengetatan moneter global, penghindaran risiko (risk-off), dan kenaikan premi risiko. Bagi negara berkembang dengan utang eksternal besar, kombinasi ini sangat berbahaya.

World Bank melaporkan bahwa negara berkembang membayar **US\$1,4 triliun** untuk layanan utang luar negeri pada 2023 (rekor), dengan lonjakan biaya bunga ke tingkat tertinggi dua dekade. Untuk negara-negara IDA, tekanan bunga meningkat tajam dan menyedot ruang anggaran yang seharusnya dipakai untuk layanan publik dan investasi pembangunan. ([World Bank](#))

Laporan berikutnya juga menyoroti bahwa utang eksternal gabungan negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai rekor baru, dengan suku bunga yang dibayar ke kreditur resmi maupun swasta berada pada level tertinggi multi-tahun. Ini penting karena di era konflik dan sanksi, persepsi risiko global dapat membuat refinancing menjadi lebih mahal atau bahkan tertutup. ([World Bank](#))

Dengan kata lain, sanksi terhadap satu kawasan dapat menular ke negara berkembang lain melalui mekanisme:

risk repricing global,

flight to safety,

penguatan mata uang utama,

spread obligasi melebar,

rollover risk meningkat.

Pada titik ini, negara berkembang menghadapi dilema klasik:

menaikkan suku bunga untuk menahan kurs (tetapi pertumbuhan melambat),

menahan suku bunga untuk menjaga ekonomi (tetapi inflasi dan kurs tertekan),

memperbesar subsidi (tetapi fiskal memburuk),

mengurangi subsidi (tetapi gejolak sosial meningkat).

4) Sanksi, konflik, dan geoeconomic fragmentation: mengapa negara miskin paling rentan?

IMF (Finance & Development) memperingatkan bahwa biaya fragmentasi geoekonomi tidak simetris. Negara berpendapatan rendah berpotensi kehilangan lebih dari 4% PDB dalam skenario fragmentasi tertentu, sekaligus menghadapi risiko krisis utang, instabilitas sosial, dan kerawanan pangan yang lebih besar. Alasannya sederhana: negara miskin lebih tergantung pada impor/ekspor komoditas kunci dan punya lebih sedikit alternatif pemasok maupun pembeli. [\(IMF\)](#)

Poin ini sangat relevan untuk membaca dampak sanksi. Dalam perdebatan publik, sanksi sering dilihat sebagai "alat tekanan terhadap negara target". Tetapi dari sudut ekonomi pembangunan, sanksi juga merupakan **pemicu fragmentasi** yang memperlebar biaya transaksi global. Akibatnya:

negara dengan kapasitas adaptasi tinggi bisa melakukan reconfiguration, negara dengan kapasitas rendah cenderung menanggung biaya penyesuaian.

Artinya, persoalan utama negara berkembang bukan hanya “apakah mendukung atau menolak sanksi”, melainkan **bagaimana bertahan dalam sistem global yang makin mahal untuk dinavigasi.**

5) Studi kasus naratif: bagaimana dampak domino bekerja

5.1 Konflik Rusia–Ukraina dan rambatan ke negara tetangga serta Global South

Perang Rusia–Ukraina adalah contoh paling jelas tentang bagaimana konflik dan sanksi memicu efek multi-kanal. IMF dalam working paper tentang spillover Rusia ke negara-negara tetangga menemukan bahwa fluktuasi output Rusia merupakan pendorong penting fluktuasi output di kawasan, dengan transmisi melalui kanal perdagangan dan kepercayaan pasar. Ringkasan IMF juga menekankan pentingnya kanal ini, khususnya bagi oil importers. ([IMF](#))

Lebih lanjut, pembahasan IMF dalam paper yang sama menunjukkan bahwa **remitansi** juga merupakan kanal transmisi penting. Hasil empirisnya mengindikasikan perubahan pertumbuhan remitansi dari Rusia terkait dengan perubahan pertumbuhan regional, terutama pada negara-negara pengimpor minyak di kawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa guncangan terhadap ekonomi negara besar dapat menular melalui dompet rumah tangga lintas batas, bukan hanya melalui statistik perdagangan. ([IMF](#))

Jika kita perluas ke Global South, perang dan sanksi memperkuat volatilitas harga energi dan pangan global, yang kemudian memukul

negara-negara pengimpor bersih. World Bank mengakui bahwa boom komoditas pasca-pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina ikut membentuk dinamika harga komoditas global, dan bahwa konflik tetap menjadi pendorong utama kerawanan pangan akut di wilayah rentan. ([World Bank](#))

Pelajaran kebijakan:

Negara berkembang tidak bisa lagi membaca konflik geopolitik sebagai isu “eksternal”. Konflik di satu kawasan dapat berubah menjadi inflasi pangan domestik, tekanan kurs, dan krisis fiskal di kawasan lain.

5.2 Iran: kompleksitas sanksi, carve-out, dan masalah over-compliance

Kasus Iran menunjukkan bahwa sanksi modern bukan sekadar blokade total, melainkan arsitektur aturan, lisensi, pengecualian, dan kepatuhan yang sangat teknis. Halaman OFAC Iran menunjukkan adanya berbagai advisory dan panduan, termasuk kanal dan due diligence untuk perdagangan kemanusiaan serta panduan terkait penjualan pangan, komoditas pertanian, obat, dan alat kesehatan. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik sanksi, otoritas berusaha membedakan antara pembatasan strategis dan kebutuhan kemanusiaan. ([OFAC](#))

Namun secara operasional, keberadaan carve-out belum tentu berarti transaksi berjalan lancar. OHCHR menekankan bahwa over-compliance oleh bank dan penyedia jasa keuangan dapat menghambat transaksi yang seharusnya sah, meningkatkan biaya, dan memperlambat pengiriman barang esensial. Di sinilah jurang antara “aturan di atas kertas” dan “akses nyata di lapangan” muncul. ([OHCHR](#))

Pada sisi Eropa, halaman resmi Consilium tentang sanksi Iran menunjukkan perubahan status kebijakan dari waktu ke waktu—

termasuk sejarah pelanggaran pasca JCPOA dan reimposisi sanksi terkait aktivitas proliferasi pada 2025. Ini menegaskan bahwa bagi pelaku usaha dan negara berkembang yang berdagang secara tidak langsung, **ketidakpastian lintasan kebijakan** sendiri sudah merupakan biaya. ([European Council](#))

Pelajaran kebijakan:

Untuk negara berkembang, kemampuan membaca perubahan regulasi, lisensi, dan risiko kepatuhan menjadi kompetensi strategis—bukan sekadar urusan legal teknis.

5.3 Venezuela: volatilitas rezim sanksi dan ketidakpastian pelaku ekonomi

Kasus Venezuela memperlihatkan dimensi lain: bukan hanya tingkat keketatan sanksi, tetapi juga **perubahan/penyesuaian kebijakan** yang mempengaruhi ekspektasi pasar. Halaman OFAC Venezuela menunjukkan keberadaan FAQ yang terkait dengan suspensi sanksi tertentu (Oktober 2023), pembaruan, dan status superseded pada 2025. Bagi investor, bank, dan perusahaan dagang, pola seperti ini menciptakan lingkungan keputusan yang sangat berhati-hati. ([OFAC](#))

Ketika rezim sanksi berubah atau ambigu, pelaku ekonomi sering mengambil posisi defensif:

menunda kontrak,

menaikkan risk premium,

meminta pembayaran di muka,

mempersempit layanan perbankan,

menambah biaya kepatuhan.

Dampaknya bagi negara berkembang lain? Mereka bisa kehilangan pasar, kehilangan pasokan, atau menghadapi biaya transaksi lebih tinggi—meski bukan pihak yang terkena sanksi langsung.

6) Dimensi kemanusiaan: ketika pengecualian ada, tetapi akses tetap sempit

Dalam diskursus kebijakan, hampir semua pihak mengakui bahwa sanksi seharusnya tidak menghambat bantuan kemanusiaan. Ini tercermin dalam Resolusi DK PBB 2664 (2022) yang menegaskan bahwa sanksi tidak dimaksudkan menimbulkan konsekuensi merugikan bagi warga sipil/humanitarian actors, dan menetapkan pengecualian untuk aktivitas kemanusiaan/basic human needs dalam rezim asset freeze tertentu. Halaman DK PBB juga mencatat kelanjutan penerapan pengecualian tersebut pada rezim ISIL/Al-Qaida melalui resolusi 2024. ([United Nations](#))

OFAC juga menerbitkan panduan kepatuhan khusus untuk bantuan kemanusiaan, termasuk untuk Suriah dan bantuan bagi rakyat Palestina, sebagai respons atas pertanyaan NGO dan publik. Ini menandakan bahwa otoritas sadar akan kebutuhan kejelasan operasional. ([OFAC](#))

Tetapi secara praktis, masalah utama tetap **friksi implementasi**:

bank takut salah,

dokumen terlalu berat,

verifikasi berlapis,

waktu terlalu lama,

biaya terlalu tinggi.

Maka, bagi negara berkembang yang berada di sekitar zona konflik atau bergantung pada bantuan/hubungan dagang sensitif, ketahanan

ekonomi perlu memasukkan unsur **ketahanan kemanusiaan-finansial**: apakah sistem domestiknya mampu memastikan arus pembayaran legal untuk kebutuhan dasar tetap berjalan?

7) Ketahanan ekonomi negara berkembang: dari “bertahan” ke “adaptif”

Membahas sanksi tanpa membahas ketahanan akan membuat analisis berhenti pada diagnosis. Pertanyaan strategisnya adalah: **apa yang bisa dilakukan negara berkembang?** Tidak ada resep tunggal, tetapi ada portofolio strategi yang dapat meningkatkan daya tahan.

7.1 Diversifikasi perdagangan dan pemasok strategis

Ketergantungan berlebihan pada satu sumber impor energi/pangan/pupuk atau satu pasar ekspor membuat negara rentan terhadap shock geopolitik. Diversifikasi bukan berarti autarki, melainkan:

memperluas mitra dagang,

kontrak jangka menengah dengan beberapa pemasok,

kombinasi spot and term contracts,

diplomasi ekonomi aktif.

Tujuannya bukan menghilangkan risiko, tetapi **menurunkan konsentrasi risiko**.

7.2 Ketahanan energi dan pangan sebagai kebijakan makro, bukan sektoral semata

Era konflik menunjukkan bahwa energi dan pangan adalah isu moneter, fiskal, dan stabilitas sosial. Karena itu, strategi ketahanan perlu menggabungkan:

cadangan penyangga (strategic reserves),

efisiensi distribusi/logistik domestik,

perlindungan kelompok rentan yang lebih tepat sasaran,

dukungan input pertanian (termasuk pupuk),

diversifikasi energi dan efisiensi energi.

World Bank menunjukkan bahwa volatilitas komoditas dapat tetap tinggi walau tren harga menurun; ini berarti negara berkembang harus membangun kebijakan yang tahan terhadap volatilitas, bukan sekadar memanfaatkan fase harga rendah. ([World Bank](#))

7.3 Memperkuat infrastruktur pembayaran dan kepatuhan lintas batas

Banyak negara berkembang fokus pada perdagangan, tetapi mengabaikan sisi "pipa pembayaran". Padahal gangguan pembayaran dapat melumpuhkan perdagangan legal. Pelajaran dari SWIFT, BIS, dan fenomena de-risking menunjukkan perlunya:

peningkatan kapasitas compliance bank domestik,

digitalisasi dokumentasi trade finance,

standardisasi data transaksi,

kerja sama regulator–bank–pelaku usaha,

jalur pembayaran alternatif yang tetap patuh hukum internasional.

Karena sanctions screening dan kewajiban regulasi makin kompleks, keunggulan kompetitif negara berkembang ke depan bukan hanya biaya tenaga kerja murah, tetapi **kemampuan transaksi yang dapat dipercaya (trusted compliance capability)**. ([Swift](#))

7.4 Manajemen utang dan ruang fiskal yang antisipatif

Data World Bank tentang beban layanan utang menunjukkan bahwa negara berkembang membutuhkan strategi fiskal yang tidak reaktif. Ini mencakup:

profil jatuh tempo utang yang lebih sehat,

pengurangan mismatch valas,

penguatan penerimaan domestik,

prioritisasi belanja yang melindungi produktivitas jangka panjang,

transparansi utang kontinjensi,

rencana kontinjensi shock komoditas.

Dalam era konflik, ketahanan fiskal bukan berarti “tidak boleh defisit”, tetapi **memiliki ruang untuk merespons shock tanpa kehilangan kredibilitas.** ([World Bank](#))

7.5 Perlindungan sosial adaptif

Dampak domino paling berbahaya biasanya terjadi ketika shock harga berubah menjadi krisis sosial. Karena itu negara berkembang perlu sistem perlindungan sosial yang:

cepat diperluas saat krisis (scalable),

berbasis data rumah tangga,

lebih tepat sasaran,

terintegrasi dengan stabilisasi pangan/energi.

Kebijakan subsidi umum yang besar sering membantu cepat di awal, tetapi mahal dan kurang tepat sasaran jika berkepanjangan. Dalam jangka menengah, transfer terarah dan dukungan produktif (misalnya untuk petani/UMKM) biasanya lebih berkelanjutan.

7.6 Diplomasi ekonomi non-blok dan manajemen risiko geopolitik

Di era konflik, banyak negara berkembang berada dalam posisi sulit: menjaga hubungan dagang dengan berbagai pihak sambil mematuhi hukum internasional dan menghindari risiko sanksi sekunder. Di sini, diplomasi ekonomi harus naik kelas:

pemetaan risiko geopolitik per sektor,

early warning policy changes,

dialog reguler dengan mitra dagang dan bank koresponden,

penguatan kapasitas legal internasional.

Ketahanan bukan sekadar "netral", tetapi **cerdas membaca medan**.

8) Indonesia dan negara berkembang lain: beberapa refleksi strategis

Walau setiap negara memiliki konteks berbeda, ada beberapa pelajaran yang relevan bagi Indonesia dan banyak negara berkembang:

Ketahanan ekonomi bukan anti-globalisasi

Justru ketahanan dibangun untuk tetap bisa berpartisipasi dalam ekonomi global yang makin tidak stabil. Dalam konteks fragmentasi, negara yang paling adaptif biasanya bukan yang paling tertutup, tetapi yang paling mampu mengelola diversifikasi dan kepatuhan.

Pangan–energi–logistik adalah satu ekosistem

Kenaikan energi memengaruhi transportasi, distribusi pangan, dan biaya produksi. Maka kebijakan sektoral yang terpisah-pisah cenderung kalah cepat dari shock.

Kapasitas institusional menentukan biaya krisis

Dua negara bisa mengalami shock eksternal yang sama, tetapi hasil

akhirnya berbeda karena perbedaan kualitas data, koordinasi kebijakan, dan kemampuan eksekusi.

Dimensi pembayaran dan kepatuhan harus masuk agenda pembangunan

Banyak diskusi pembangunan fokus pada pelabuhan, jalan, dan industri; padahal di era sanksi, "infrastruktur kepatuhan dan pembayaran" sama pentingnya untuk menjaga arus perdagangan legal.

Perlindungan sosial adalah alat stabilisasi makro

Di era konflik, perlindungan sosial bukan sekadar agenda kesejahteraan, melainkan penahan transmisi shock agar tidak berubah menjadi kontraksi permintaan domestik dan instabilitas sosial.

9) Menuju kerangka ketahanan ekonomi yang lebih matang

Jika diringkas, strategi ketahanan negara berkembang di era konflik dan sanksi perlu bergerak dari pendekatan "pemadam kebakaran" menjadi pendekatan **arsitektur ketahanan**. Arsitektur ini setidaknya terdiri dari lima pilar:

Pilar 1: Buffer

cadangan devisa memadai,
cadangan pangan/energi strategis,
ruang fiskal kontinjensi.

Pilar 2: Diversification

pasar ekspor beragam,
sumber impor strategis beragam,
struktur ekonomi lebih bernilai tambah.

Pilar 3: Capability

kapasitas compliance dan legal,

data real-time untuk monitoring harga/pasokan,

koordinasi antar-otoritas.

Pilar 4: Protection

social safety nets adaptif,

dukungan ke sektor produktif rentan,

perlindungan konsumen terhadap lonjakan harga.

Pilar 5: Diplomacy

manajemen risiko geopolitik,

kerja sama regional,

akses pembiayaan darurat/likuiditas multilateral.

Kerangka seperti ini relevan karena dunia tidak sedang bergerak menuju stabilitas yang sederhana. World Bank dan IMF sama-sama menunjukkan bahwa sekalipun ada fase pertumbuhan dan penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan, ketegangan dagang, dan fragmentasi tetap menjadi risiko nyata—dan beban penyesuaian paling berat sering jatuh pada negara berkembang. ([World Bank](#))

Kesimpulan

“Sanksi ekonomi” di era konflik tidak lagi dapat dipahami sebagai instrumen yang efeknya berhenti pada negara target. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, sanksi menghasilkan **dampak domino** melalui harga komoditas, rantai pasok, sistem pembayaran, perilaku perbankan, pembiayaan eksternal, dan ekspektasi pasar. Negara

berkembang menjadi paling rentan karena struktur ketergantungan impor-ekspor, ruang fiskal yang terbatas, dan kapasitas institusional yang sering belum memadai untuk menavigasi kompleksitas kepatuhan global. ([OFAC](#))

Pelajaran utamanya adalah ini: **ketahanan ekonomi bukan berarti kebal terhadap shock, tetapi mampu mencegah shock eksternal berubah menjadi krisis pembangunan domestik.** Untuk itu, negara berkembang perlu membangun kombinasi kebijakan yang mencakup diversifikasi perdagangan, ketahanan pangan-energi, kapasitas pembayaran dan kepatuhan lintas batas, manajemen utang yang antisipatif, serta perlindungan sosial yang adaptif. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, kemampuan mengelola keterhubungan justru menjadi inti dari kedaulatan ekonomi yang cerdas. ([Bank for International Settlements](#))

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Referensi** untuk melengkapi makalah "*Sanksi Ekonomi dan Dampak Domino: Ketahanan Ekonomi Negara Berkembang di Era Konflik.*"

Glosarium

1) Sanksi Ekonomi (Economic Sanctions)

Instrumen kebijakan luar negeri yang menggunakan pembatasan ekonomi, perdagangan, atau keuangan untuk memengaruhi perilaku negara, organisasi, perusahaan, atau individu tertentu.

2) Sanksi Komprehensif

Jenis sanksi yang mencakup pembatasan luas terhadap sektor ekonomi atau negara tertentu (misalnya perdagangan, keuangan, investasi, dan jasa).

3) Sanksi Selektif / Targeted Sanctions

Sanksi yang diarahkan secara spesifik pada individu, entitas, sektor, atau transaksi tertentu (misalnya pembekuan aset pejabat, larangan perjalanan, atau pembatasan ekspor teknologi tertentu).

4) Pembekuan Aset (Asset Freeze)

Larangan penggunaan, pemindahan, atau akses terhadap aset milik individu/entitas yang masuk daftar sanksi.

5) Pembatasan Perdagangan (Trade Restrictions)

Larangan atau pembatasan impor/ekspor barang dan jasa tertentu, baik bersifat total maupun parsial.

6) Pembatasan Finansial (Financial Sanctions)

Pembatasan terhadap akses ke sistem keuangan, bank, pembiayaan, instrumen pasar modal, atau layanan pembayaran lintas batas.

7) Over-Compliance

Perilaku kehati-hatian berlebihan dari bank/perusahaan (misalnya menolak transaksi legal) karena takut melanggar aturan sanksi. Fenomena ini sering memperluas dampak sanksi di luar target formal. Konsep ini banyak dibahas dalam panduan OHCHR. ([OHCHR](#))

8) Secondary Sanctions Risk

Risiko sanksi terhadap pihak ketiga (perusahaan/bank non-target) yang tetap bertransaksi dengan pihak yang terkena sanksi. Risiko ini mendorong banyak lembaga keuangan melakukan "penghindaran" secara luas.

9) Dampak Domino (Domino Effect)

Rangkaian efek berantai ketika satu guncangan (misalnya sanksi) menyebar ke berbagai sektor: harga komoditas, logistik, inflasi, kurs, bunga, utang, hingga stabilitas sosial.

10) Spillover Effect (Efek Rambatan)

Dampak tidak langsung dari kebijakan/krisis di satu negara atau kawasan terhadap negara lain melalui jalur perdagangan, keuangan, remitansi, atau ekspektasi pasar.

11) Geoeconomic Fragmentation

Terpecahnya keterhubungan ekonomi global karena pertimbangan geopolitik, blok perdagangan, pembatasan investasi, dan restriksi teknologi. IMF menempatkannya sebagai salah satu risiko struktural utama ekonomi global. ([IMF](#))

12) Rantai Pasok Global (Global Supply Chain)

Jaringan lintas negara yang menghubungkan produksi, komponen, logistik, pembiayaan, dan distribusi barang/jasa dari hulu ke hilir.

13) Rerouting Perdagangan

Pengalihan jalur perdagangan dan logistik ke negara/pelabuhan/perantara lain akibat konflik, sanksi, atau hambatan perdagangan.

14) Volatilitas Harga Komoditas

Naik-turunnya harga komoditas (energi, pangan, logam, pupuk, dsb.) secara tajam dalam periode tertentu, yang meningkatkan risiko makroekonomi bagi negara berkembang.

15) Inflasi Impor (Imported Inflation)

Kenaikan harga domestik yang berasal dari naiknya harga barang impor atau depresiasi nilai tukar.

16) Terms of Trade

Perbandingan antara harga ekspor dan harga impor suatu negara. Memburuknya *terms of trade* dapat menekan pendapatan nasional dan nilai tukar.

17) Cadangan Devisa (Foreign Exchange Reserves)

Aset valuta asing yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas kurs, membayar impor, dan memenuhi kewajiban eksternal.

18) Trade Finance

Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan internasional (misalnya *letter of credit*, *bank guarantee*, *export credit*) yang membantu mengurangi risiko transaksi.

19) Correspondent Banking

Hubungan antarbank lintas negara yang memungkinkan transfer internasional, penyelesaian transaksi, dan layanan pembayaran dalam mata uang asing.

20) De-risking

Keputusan bank koresponden untuk mengurangi atau menghentikan hubungan dengan klien/koridor/negara tertentu karena biaya kepatuhan dan risiko regulasi dianggap terlalu tinggi. Isu ini relevan untuk remitansi dan inklusi keuangan lintas batas. ([World Bank](#))

21) Remitansi

Transfer uang dari pekerja migran kepada keluarga/rumah tangga di negara asal. Pada banyak negara berkembang, remitansi adalah penopang konsumsi, pendidikan, dan ketahanan sosial.

22) Sanctions Screening

Proses penyaringan transaksi/pihak terhadap daftar sanksi untuk memastikan kepatuhan sebelum transaksi diproses. SWIFT dan BIS banyak menyinggung kompleksitas proses ini dalam konteks pembayaran lintas batas. ([Swift](#))

23) Compliance by Design

Pendekatan perancangan sistem (terutama pembayaran lintas batas) yang menanamkan aturan kepatuhan sejak awal arsitektur proses agar verifikasi lebih cepat dan konsisten. Konsep ini menonjol dalam Project Mandala (BIS). ([Bank for International Settlements](#))

24) Ruang Fiskal (Fiscal Space)

Kapasitas pemerintah untuk meningkatkan belanja atau memberi stimulus tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal dan stabilitas makro.

25) Debt Service (Layanan Utang)

Pembayaran pokok dan bunga utang dalam periode tertentu. Kenaikan *debt service* mempersempit ruang anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan investasi publik. ([World Bank](#))

26) Risiko Refinancing / Rollover Risk

Risiko ketika utang jatuh tempo harus diperpanjang (refinancing) dengan biaya jauh lebih mahal atau sulit memperoleh pembiayaan baru.

27) Premi Risiko (Risk Premium)

Tambahan imbal hasil yang diminta investor karena menilai suatu negara atau aset lebih berisiko, misalnya akibat konflik, ketidakpastian kebijakan, atau tekanan fiskal.

28) Perlindungan Sosial Adaptif

Sistem bantuan sosial yang dapat diperluas dengan cepat saat krisis (misalnya lonjakan harga pangan/energi) dan lebih tepat sasaran berbasis data.

29) Ketahanan Ekonomi (Economic Resilience)

Kemampuan ekonomi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan pulih tanpa berubah menjadi krisis sistemik jangka panjang.

30) Ketahanan Pangan (Food Security)

Kondisi ketika seluruh penduduk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat.

31) Ketahanan Energi (Energy Security)

Kemampuan negara menjamin ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan meskipun terjadi gangguan eksternal.

32) Humanitarian Exemption / Humanitarian Carve-out

Pengecualian dalam rezim sanksi untuk memungkinkan aktivitas kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap berjalan. Resolusi DK PBB 2664 adalah rujukan penting dalam konteks ini. ([United Nations](#))

33) Policy Uncertainty (Ketidakpastian Kebijakan)

Kondisi ketika pelaku ekonomi sulit memprediksi arah kebijakan perdagangan, moneter, fiskal, atau geopolitik, sehingga investasi dan perdagangan cenderung tertunda.

34) Shock Harga Energi–Fiskal–Kurs (Energy–Fiscal–FX Spiral)

Situasi ketika kenaikan harga energi meningkatkan subsidi dan defisit fiskal, lalu menekan kurs, sehingga biaya impor makin tinggi dan inflasi berulang.

Referensi

Di bawah ini adalah daftar referensi utama (lembaga internasional dan sumber primer) yang relevan untuk topik sanksi ekonomi, spillover, dan ketahanan ekonomi negara berkembang.

A. Referensi Utama (Lembaga Internasional / Sumber Primer)

International Monetary Fund (IMF). *Geopolitics and its Impact on Global Trade and the Dollar* (pidato Gita Gopinath, 7 Mei 2024).

Digunakan untuk konteks fragmentasi geopolitik, perdagangan global, dan implikasi terhadap sistem moneter internasional. ([IMF](#))

International Monetary Fund (IMF), Finance & Development.

Bolhuis, M. A., Chen, J., & Kett, B. (2023). *The Costs of Geoeconomic Fragmentation*. Digunakan untuk kerangka biaya fragmentasi geoekonomi dan implikasinya bagi negara berpendapatan rendah/menengah. ([IMF](#))

International Monetary Fund (IMF Working Paper). Arzoumanian, S.

(2023). *Spillovers from Russia to Neighboring Countries: Transmission Channels and Policy Options* (WP/23/185). Digunakan untuk pembahasan kanal transmisi melalui perdagangan, kepercayaan pasar, dan remitansi. ([IMF](#))

World Bank. *Commodity Markets Outlook – April 2025* (press release dan publikasi terkait). Digunakan untuk analisis volatilitas komoditas, harga energi/pangan, dan risiko terkait konflik serta hambatan perdagangan. ([World Bank](#))

World Bank. *International Debt Report 2024* (press release, 3 Desember 2024): developing countries paid record foreign debt service in 2023. Digunakan untuk pembahasan tekanan layanan utang dan ruang fiskal negara berkembang. ([World Bank](#))

World Bank. *Global Economic Prospects – January 2026* (press release). Digunakan untuk konteks pertumbuhan global, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan sebagai latar makro. ([World Bank](#))

World Bank (KNOMAD / Migration & Remittances). *Remittances* (brief). Digunakan untuk pembahasan pentingnya remitansi dan relevansi biaya transfer/de-risking dalam ketahanan rumah tangga di negara berkembang. ([World Bank](#))

Food and Agriculture Organization (FAO). *FAO Food Price Index (FFPI)*. Digunakan untuk kerangka pemantauan dinamika harga pangan internasional dan volatilitas komponen pangan global. ([FAOHome](#))

U.S. Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Control (OFAC). *Sanctions Programs and Country Information*. Digunakan untuk definisi umum program sanksi, karakter komprehensif vs selektif, dan struktur pembatasan OFAC. ([OFAC](#))

OFAC. *Iran Sanctions*. Digunakan untuk contoh kompleksitas rezim sanksi, lisensi, FAQ, dan guidance dalam praktik kepatuhan. ([OFAC](#))

OFAC. *Venezuela-Related Sanctions*. Digunakan untuk ilustrasi dinamika lisensi, FAQ, dan perubahan rezim sanksi yang memengaruhi ekspektasi pelaku pasar. ([OFAC](#))

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Guidance Note on Overcompliance with Unilateral Sanctions and its Harmful Effects on Human Rights*. Digunakan untuk konsep over-compliance dan dampaknya pada transaksi legal/humanitarian. ([OHCHR](#))

United Nations Security Council. *S/RES/2664 (2022)*. Digunakan untuk dasar pembahasan pengecualian kemanusiaan (humanitarian exemption) dalam rezim sanksi PBB. ([United Nations](#))

SWIFT. *Swift and Sanctions* (halaman kepatuhan resmi). Digunakan untuk konteks kepatuhan sanksi dalam infrastruktur pesan keuangan dan layanan screening/testing. ([Swift](#))

Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub. *Project Mandala: Streamlining Cross-Border Transaction Compliance* (2024). Digunakan untuk pembahasan *compliance by design, sanctions screening,* dan friksi pembayaran lintas batas. ([Bank for International Settlements](#))

Council of the European Union (Consilium). *EU sanctions against Iran* (halaman kebijakan resmi). Digunakan sebagai contoh evolusi kebijakan sanksi regional dan perubahan status sanksi dari waktu ke waktu. ([European Council](#))

B. Saran Format Sitasi (untuk makalah Bapak)

Jika Bapak ingin menyusun versi final makalah secara akademik, saya sarankan memakai salah satu format berikut:

APA 7th (paling praktis untuk ilmu sosial/manajemen)

Chicago Author-Date

Harvard style

Untuk topik kebijakan global seperti ini, referensi dari lembaga (IMF, World Bank, FAO, OFAC, BIS, PBB, EU) sangat cocok ditulis sebagai **corporate author**.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 25 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/699ed9ff-fa1c-839e-93c1-2b1b9e8acea7>